

Pembangunan Ekonomi Timor Timur: Tantangan Bagi Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Penduduk

Hadi Soesastro

Pengantar

PADA tahun 1990 ekonomi provinsi Timor Timur telah mengalami laju pertumbuhan yang tinggi, yaitu sebesar 11,6% (atas dasar harga konstan 1983). Menurut perkiraan, laju pertumbuhan pada tahun 1991 juga berkisar pada 11% (Antara, 16 Januari 1992). Pertumbuhan selama dua tahun terakhir ini lebih tinggi daripada yang dicapai selama periode 1983-1989, yaitu sebesar rata-rata 7,4% per tahun. Sejauh ini laju pertumbuhan yang dicapai oleh propinsi Timor Timur umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan yang tinggi ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk, terutama mengingat laju pertumbuhan penduduk yang masih sangat tinggi, yaitu sekitar 3% per tahun. Selama periode 1983-1990 pertumbuhan pendapatan per kepala telah meningkat sebesar sekitar 4,4% per tahun. Walaupun demikian pendapatan per kepala

penduduk Timor Timur pada tahun 1990 baru mencapai Rp 347.721,00 atau sekitar 38% dari tingkat rata-rata pendapatan per kepala penduduk Indonesia.

Pertumbuhan yang tinggi juga diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang memadai. Hasil survei angkatan kerja yang dilakukan oleh BPS (Saker-nas 1989 dan Sakernas 1990) menunjukkan bahwa angkatan kerja di propinsi Timor Timur meningkat sebesar 8% dari tahun 1989 ke tahun 1990. Peningkatan ini sangat tinggi. Jika memang demikian, dan apabila elastisitas penyediaan lapangan kerja (*employment elasticity*) diandaikan sebesar 0.46, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar lebih dari 17% per tahun untuk dapat menyerap peningkatan angkatan kerja tersebut. Laju pertumbuhan sebesar ini tentu saja jauh di luar jangkauan untuk dapat dicapai. Selama periode Repelita V ini diperkirakan bahwa pertumbuhan penduduk sebesar 2,63% per tahun akan diikuti oleh kenaikan angkatan kerja sebesar "hanya" 3,74% per tahun. Perkiraan kenaikan yang

lebih rendah ini saja sudah berarti peningkatan kebutuhan lapangan kerja baru sebanyak 11.600 rata-rata per tahunnya.

Menurut laporan, pada akhir tahun 1991 jumlah pencari kerja di Timor Timur mencapai 6.390 orang yang terdiri dari 3.664 laki-laki dan 2.626 perempuan. Dari jumlah ini 6% adalah lulusan SD, 23% lulusan SLTP, 61% lulusan SLTA, dan 9% lulusan perguruan tinggi (*Angkatan Bersenjata*, 14 Februari 1992). Setiap tahunnya sekitar 4.000 orang lulusan SLTA mencari pekerjaan (*Jakarta Post*, 22 November 1991). Sebagian besar dari jumlah ini kiranya bermukim di perkotaan. Menurut hasil Sakernas 1990, 67% dari jumlah pencari kerja adalah lulusan SLTA (umum dan kejuruan).

Data-data ini menunjukkan bahwa masalah penciptaan lapangan kerja merupakan masalah serius. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang telah dicapai beberapa tahun terakhir ternyata belum dapat mengatasi masalah ini. Kenyataan ini dapat menandakan terjadinya suatu "krisis" dalam pembangunan Timor Timur. Ada kemungkinan bahwa kesulitan yang dihadapi justru timbul oleh karena pembangunan yang terlampaui cepat. Tetapi ada pula kemungkinan bahwa persoalan yang dihadapi lebih banyak bersifat struktural, yaitu karena "mismatch" antara penyediaan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Berbagai laporan menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi di berbagai kegiatan ekonomi tertentu, misalnya di sektor perkebunan dan untuk pengembangan hutan tanaman industri (*Suara Karya*, 3 Januari 1992), atau di sektor penggalian seperti yang dialami oleh PT Marmer Alam Timor Timur (*Antara*, 19 Desember 1991).

Makalah ini mencoba mencari sumber penyebab "krisis" tersebut. Dalam bagian pertama akan dibahas perubahan struktur ekonomi Timor Timur. Bagian berikutnya akan membahas keadaan ketenagakerjaan di Timor Timur. Bagian terakhir, yang merupakan penutup, akan membahas peranan penanaman modal swasta dalam pembangunan ekonomi Timor Timur.

Perubahan Struktur Ekonomi

Seperti terlihat pada Tabel 1, selama periode 1983-1990 telah terjadi pergeseran yang cukup berarti dalam struktur ekonomi Timor Timur, seperti ditandai oleh menurunnya peranan sektor pertanian dalam PDRB (produk domestik regional bruto), yaitu dari 44,5% pada tahun 1983 menjadi 39,6% pada tahun 1990. Sektor pertanian masih merupakan penyumbang yang terbesar pada PDRB. Sektor kedua terbesar adalah sektor pemerintahan dan pertahanan, yaitu sekitar 20% dari PDRB. Ini diikuti oleh sektor bangunan dengan peranan yang meningkat dari 12,3% pada tahun 1983 menjadi 13,4% pada tahun 1990. Sektor-sektor utama lainnya adalah perdagangan dan transportasi & komunikasi, dengan peranan sebesar sekitar 9% masing-masing. Peranan sektor transportasi & komunikasi mengalami peningkatan yang berarti, yaitu dari 5,2% pada tahun 1983 menjadi 9,3% pada tahun 1990.

Selama periode 1983-1990, sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% per tahun. Laju pertumbuhan ini lebih rendah daripada laju pertumbuhan PDRB, sehingga peranan sektor ini menurun. Subsektor perikanan mengalami pertumbuhan yang tinggi, di atas 12%, tetapi

Tabel 1

DISTRIBUSI PDRB DAN LAJU PERTUMBUHAN PDRB, 1983-1990

(Persen)

	Distribusi PDRB ^a		Laju Pertumbuhan
	1983	1990	Per Tahun 1983-1990
1. PERTANIAN	44,49	39,57	5,02
a. Tanaman Pangan	20,75	19,10	6,63
b. Tanaman Perkebunan	14,09	14,13	1,95
c. Peternakan	8,99	5,64	5,24
d. Kehutanan	0,39	0,30	5,76
e. Perikanan	0,53	0,64	12,31
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	0,53	0,64	12,31
a. Pertambangan			
b. Penggalian	0,53	0,64	12,31
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1,25	1,69	12,71
a. Industri Besar & Sedang	0,74	0,62	5,34
b. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	0,51	1,07	19,93
4. LISTRIK DAN AIR MINUM	0,63	0,81	18,01
a. Listrik	0,58	0,69	16,65
b. Air Minum	0,05	0,12	29,40
5. BANGUNAN	12,26	13,42	11,51
6. PERDAGANGAN, RESTORAN & HOTEL	7,89	9,87	12,01
a. Perdagangan Besar & Eceran	7,25	8,92	11,89
b. Restoran	0,42	0,75	15,33
c. Hotel	0,22	0,19	8,74
7. TRANSPOR & KOMUNIKASI	5,19	9,25	14,06
a. Transpor Darat	3,19	6,44	14,54
b. Transpor Laut	0,57	0,79	16,59
c. Transpor Udara	1,19	1,77	12,02
d. Komunikasi	0,24	0,26	10,27
8. BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN	3,21	1,76	-2,46
a. Bank	3,04	1,49	-4,44
b. Asuransi	0,15	0,23	15,86
c. Koperasi	0,03	0,04	15,04
9. SEWA RUMAH	2,84	1,83	3,26
10. PEMERINTAH & PERTAHANAN	20,83	19,91	8,11
11. JASA-JASA	0,87	1,24	16,50
a. Jasa Perusahaan	0,03	0,06	22,49
b. Jasa Sosial & Masyarakat	0,10	0,29	28,42
c. Jasa Hiburan & Kebudayaan	0,07	0,04	1,84
d. Jasa Perorangan & Rumah Tangga	0,68	0,86	14,65
12. PDRB	100,00	100,00	7,89

^aatas dasar harga berlaku.Sumber: Bappeda Tk. 1 dan Kantor Statistik Propinsi Timor Timur, *Pendapatan Regional Propinsi Timor Timur, 1983-1990* (Januari 1992).

perannya dalam pembentukan PDRB masih sangat kecil, yaitu kurang dari 0,5% saja pada tahun 1990. Subsektor perkebunan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,95% rata-rata per tahun. Perkembangan selama periode 1983-1990 menunjukkan bahwa peranan subsektor ini sebenarnya telah mengalami peningkatan dari tahun 1983 hingga 1988 tetapi sejak itu menurun secara tajam. Sementara itu peranan subsektor peternakan terus-menerus mengalami penurunan. Laju pertumbuhan subsektor tanaman pangan, yaitu sebesar 6,63% rata-rata per tahun, cukup baik. Hal ini telah meningkatkan kemampuan produksi pangan propinsi ini, sehingga impor beras telah sangat berkurang. Jika pada tahun 1988 propinsi ini masih mengimpor sekitar 25.000 ton beras, jumlah impor pada tahun 1990 telah menurun menjadi 5.000 ton.

Sektor penggalian juga telah mengalami pertumbuhan yang pesat, tetapi perannya dalam pembentukan PDRB juga masih sangat kecil (0,6% pada tahun 1990). Industri kecil dan kerajinan rumah tangga tumbuh dengan rata-rata sebesar hampir 20% per tahun, sehingga perannya telah meningkat dari 0,5% pada tahun 1983 menjadi lebih dari 1% pada tahun 1990. Subsektor ini bersifat padat karya, dan masih dapat dikembangkan, tetapi jelas tidak akan menjadi penyerap tenaga kerja yang utama. Sektor listrik dan air minum, walaupun tumbuh dengan sangat pesat (18% per tahun), bukan merupakan penyerap tenaga kerja. Sebaliknya, sektor bangunan dan sektor perdagangan dapat bersifat padat karya. Kedua sektor yang mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembentukan PDRB ini masing-masing telah tumbuh dengan hampir 12% rata-rata per tahun.

Pertumbuhan sektor transportasi dan ko-

munikasi juga sangat pesat. Di luar sektor pemerintahan dan pertahanan, sektor jasa-jasa lainnya belum memainkan peranan yang berarti dalam pembentukan PDRB. Laju pertumbuhan sektor-sektor ini sangat bervariasi, dari 28,4% rata-rata per tahun di subsektor jasa hiburan dan kemasyarakatan hingga -4,4% rata-rata di subsektor bank.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Timor Timur terkonsentrasi pada pembangunan prasarana (transportasi & komunikasi, listrik dan air minum, serta bangunan). Pembangunan prasarana yang pesat ini tampaknya belum dapat mendorong sektor-sektor produktif. Peranan sektor-sektor ini ditambah dengan peranan prasarana administratif, yaitu sektor pemerintahan dan pertahanan, mencapai sekitar 45% pada tahun 1989 dan 1990. Di propinsi NTT, misalnya peranan sektor-sektor ini lebih rendah, yaitu 28% dari PDRB, sedangkan di propinsi NTB lebih rendah lagi, yaitu sekitar 23% dari PDRB. Sebaliknya, peranan sektor-sektor produksi primer di Timor Timur (41%) lebih rendah daripada di NTT (53%) dan NTB (51%). Peranan sektor industri pengolahan di ketiga propinsi ini masih rendah. Peranan sektor perdagangan (dan sektor jasa-jasa lainnya, kecuali pemerintahan dan pertahanan) di Timor Timur lebih kecil daripada di kedua propinsi tersebut.

Dari bahasan singkat ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Timor Timur mungkin telah berjalan secara tidak seimbang, dalam pengertian bahwa sektor-sektor prasarana tumbuh terlampaui cepat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor-sektor produksi primer. Dengan perkataan lain, peranan sektor produksi primer, terutama pertanian, telah menurun dengan terlampaui cepat.

Tabel 2

PENGGUNAAN PDRB TIMOR TIMUR, 1983-1989
(Persen)

	Penggunaan PDRB ^a		Laju Pertumbuhan
	1983	1989	Per Tahun 1983-1989
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	96,68	71,78	3,32
2. Pengeluaran Konsumsi lmb. sw.	0,08	0,25	30,70
(1+2)	96,76	72,03	3,37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	26,67	23,93	6,63
4. Pembentukan Modal Tetap	19,77	23,64	13,14
5. Perubahan Stok	(17,00)	(5,25)	5,95
(4+5)	2,77	18,39	35,85
6. Ekspor Barang dan Jasa	3,97	6,53	17,31
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	30,17	20,88	1,46
(6-7)	(26,20)	(14,35)	2,52
Jumlah	100,00	100,00	7,24

^aatas dasar harga berlaku.

Sumber: BPS, *Pendapatan Regional Propinsi-propinsi di Indonesia Menurut Penggunaan, 1983-1989* (Desember 1991).

Dilihat dari segi penggunaan PDRB juga telah terjadi perubahan strukturnya (Tabel 2). Pengeluaran konsumsi swasta mengalami penurunan yang berarti, dari 96,7% dari PDRB pada tahun 1983 menjadi 71,8% pada tahun 1989. Sementara itu pembentukan modal tetap meningkat dari 19,8% pada tahun 1983 menjadi 23,6% pada tahun 1989. Pengeluaran konsumsi pemerintah tidak mengalami perubahan yang berarti dan masih merupakan bagian yang cukup besar. Pada tahun 1989, pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 23,6% dari PDRB, jauh di atas rata-rata nasional, yaitu 9,4%. Ekspor telah mengalami kenaikan, yaitu dari 4% PDRB pada tahun 1983 menjadi 6,5% pada tahun 1989, sementara dalam periode yang

sama impor mengalami penurunan dari 30,2% menjadi 20,9%. Namun propinsi ini masih mengalami kelebihan impor. Kelebihan impor ini mencapai 26,2% PDRB pada tahun 1983, dan telah menurun menjadi 14,4% pada tahun 1989.

Data-data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang tinggi yang dicapai oleh Timor Timur telah dimungkinkan oleh transfer sumber daya ekonomi dari luar yang besarnya masih sekitar 15% PDRB pada tahun 1989. Pada tahun 1983 transfer tersebut masih berada pada sekitar 26% PDRB. Di NTT transfer dari luar juga masih berada pada sekitar 15% PDRB, tetapi di NTB besarnya transfer itu sudah lebih ren-

dah, yaitu hanya 5,8% dari PDRB. Bahasan ini menunjukkan bahwa alokasi sumber daya ekonomi dari luar memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi pola pergeseran struktur ekonomi Timor Timur, dan kiranya perlu dilakukan pengkajian mengenai perlu tidaknya dilakukan perubahan dalam kebijaksanaan atau mekanisme alokasi tersebut.

Keadaan Ketenagakerjaan

Tabel 3 menunjukkan bahwa sekitar 83,5% angkatan kerja di Timor Timur berada di sektor pertanian. Sektor penyerap angkatan kerja terbesar yang kedua adalah pemerintahan (jasa kemasyarakatan), yaitu sekitar 9,1%. Dari sisanya, sekitar 5% berada di sektor industri dan perdagangan. Sektor-sektor prasarana yang tumbuh dengan pesat, seperti yang dibahas dalam ba-

gian terdahulu, tampaknya bukan merupakan sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan tenaga kerja yang dihadapi Timor Timur untuk sebagian bersumber pada pola perkembangan struktur ekonominya.

Data-data Sakernas 1990 menunjukkan bahwa dari jumlah angkatan kerja sebanyak 353.799 orang, sebanyak 61,9% tidak pernah sekolah, 14,2% tidak tamat SD, 13,3% tamat SD, 5,2% tamat SLTP, 4,8% tamat SLTA, dan sisanya sebesar 0,6% menyelesaikan pendidikan akademi atau universitas. Survei itu juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah (50,7%) angkatan kerja merupakan pekerja keluarga. Selebihnya, 27,2% berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga (atau buruh tidak tetap), 11,8% berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain, dan hanya 0,05% saja yang berusaha dengan dibantu buruh tetap. Jumlah buruh dan kar-

Tabel 3

ANGKATAN KERJA MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA, 1989-1990

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

	1990	%
1. Pertanian	295.376	83,49
2. Pertambangan	313	0,01
3. Industri Pengolahan	9.263	2,62
4. Listrik, Gas dan Air	-	-
5. Bangunan	3.675	1,04
6. Perdagangan	10.216	2,89
7. Transpor & Komunikasi	1.362	0,38
8. Keuangan, Sewa, Jasa Perusahaan	544	0,02
9. Jasa Kemasyarakatan	32.273	9,12
10. Lainnya	272	0,01
Jumlah	353.799	100,00

Sumber: Sakernas 1990.

yawan pada tahun 1990 adalah 34.587 orang, atau hampir 10% dari seluruh angkatan kerja. Untuk Indonesia secara keseluruhan, jumlah buruh dan jumlah pekerja keluarga hampir sama banyaknya, yaitu sekitar 27% masing-masing dari seluruh angkatan kerja.

Hasil survei angkatan kerja di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja Timor Timur masih rendah. Untuk itu peningkatan pendidikan dan peluang memperoleh latihan memang diperlukan. Hal ini terutama harus ditujukan pada peningkatan pendapatan penduduk yang umumnya akan meningkat dengan peningkatan pendidikan. Tetapi jenjang pendidikan yang optimal tidaklah selalu berarti jenjang pendidikan yang tertinggi, yaitu universalitas. Bahkan SLTA belum tentu merupakan jenjang pendidikan yang optimal. Data-data Sakernas juga menunjukkan besarnya peningkatan pendapatan (upah/gaji) dengan meningkatnya jenjang pendidikan (Tabel 4).

Dari data di atas dapat segera dilihat bahwa seseorang yang tamat SD akan mendapat upah sebesar dua kali dari seseorang yang tidak pernah sekolah. Tetapi perbedaan antara upah tamatan SD dengan upah seorang putus-sekolah (*drop-out*) SD tidaklah berarti. Dengan demikian, yang optimal bukanlah menamatkan SD melainkan meneruskan hingga tamat SLTP. Sebab, dengan menambah 3 tahun belajar, upah/gaji akan dapat meningkat sebesar 25% jika mengam-

nya. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada, meningkatkan kualitas tenaga kerja yang baru, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang akan datang.

Tabel 4

UPAH/GAJI MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI TIMOR TIMUR, 1990

Pendidikan	Tahun Belajar	Upah/Gaji Per Jam ^a (Rp)
Tidak Sekolah	0	363
Tidak Tamat SD	6	617
Tamat SD	6	760
Tamat SLTP		
- Umum	9	953
- Kejuruan	9	785
Tamat SLTA		
- Umum	12	1.055
- Kejuruan	12	822
Diploma I/II	13-14	1.217
Akademi/Diploma III	14-15	1.349
Universitas	16-17	1.867

^aDihitung berdasarkan pendapatan per bulan dibagi dengan jumlah jam kerja (atas dasar jam kerja mingguan).

Sumber: Sakernas 1990.

bil pendidikan umum. Tampaknya di Timor Timur lulusan SLTP kejuruan belum mendapatkan penghargaan yang sama (atau lebih) daripada lulusan SLTP umum. Hal ini juga berlaku untuk Indonesia secara keseluruhan beberapa waktu lalu. Namun Sakernas 1990 menunjukkan bahwa untuk Indonesia secara keseluruhan telah terjadi perubahan dalam penghargaan masyarakat terhadap lulusan SLTP kejuruan, sehingga upah/gaji mereka kini telah sama dengan upah/gaji lulusan SLTP umum. Atas dasar ini dapat diharapkan bahwa perkembangan yang sama juga akan terjadi di Timor Timur.

Lulusan SLTA kejuruan di Timor Timur juga memperoleh upah/gaji yang lebih rendah daripada lulusan SLTA umum. Untuk Indonesia secara keseluruhan kini juga telah tercapai kesamaan penghargaan. Upah/gaji lulusan SLTA umum hanya 10% lebih tinggi daripada lulusan SLTP umum. Lulusan SLTA kejuruan hanya 5% lebih tinggi daripada lulusan SLTP kejuruan. Ini berarti bahwa SLTA bukanlah jenjang pendidikan yang optimal bagi tenaga kerja. Yang optimal adalah SLTP.

Pendidikan SLTA harus dilihat sebagai tahapan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dengan menambah 2 sampai 5 tahun pendidikan seseorang di Timor Timur dapat memperoleh upah/gaji yang berkisar antara 15% hingga 77% lebih tinggi. Tetapi ini bukan berarti bahwa jenjang pendidikan yang optimal untuk semua adalah jenjang pendidikan yang tertinggi. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendidikan yang optimal bagi sebagian besar penduduk adalah SLTP. Hal ini mungkin juga lebih sesuai dengan perkembangan ketersediaan lapangan kerja.

Sakernas 1990 menunjukkan bahwa upah/gaji rata-rata tertinggi terdapat di sektor pemerintahan (jasa kemasyarakatan), yaitu Rp 895 per jam, disusul oleh sektor bangunan Rp 602 per jam. Upah/gaji di sektor pertanian (perkebunan, peternakan, perikanan) mencapai Rp 552 rata-rata per jam, dan lebih tinggi daripada di sektor lainnya (angkutan dan komunikasi Rp 495 per jam, pertambangan Rp 405 per jam, perdagangan Rp 361 per jam, jasa-jasa lain Rp 232 per jam). Upah/gaji yang terendah adalah di sektor industri (kecil dan kerajinan rumah tangga), yaitu Rp 154 per jam saja.

Beberapa Kesimpulan

Dari uraian singkat di atas tampak bahwa baik dari segi penciptaan lapangan kerja maupun dari segi peningkatan pendapatan penduduk, upaya untuk memajukan (memodernisasi) sektor pertanian merupakan upaya optimal untuk mengatasi "krisis" pembangunan yang kini dialami Timor Timur. Dalam hubungan ini pernyataan Gubernur Carrascalao sangatlah tepat bahwa: "Sektor pertanian merupakan satu-satunya harapan di Timor Timur untuk menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak, mengingat potensi yang ada selama ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya" (*Media Indonesia*, 2 Januari 1992).

Pernyataan itu disampaikan pada peresmian proyek percontohan pengembangan pertanian di Betano, Kabupaten Manufahi, yang memang dimaksudkan untuk merangsang lulusan SLTP dan SLTA untuk terjun dalam bidang pertanian. Dalam proyek percontohan itu produktivitas dapat ditingkatkan mencapai 9,6 ton padi per ha dibandingkan dengan produktivitas rata-rata sebesar

3,3 ton padi per ha (*Antara*, 22 Februari 1992).

Pembiayaan untuk proyek ini berasal dari pemerintah daerah. Dalam hubungan ini perlu dibahas persoalan pembiayaan pembangunan serta strategi dan mekanismenya, sehingga alokasi sumber daya ekonomi dapat semakin mengarah pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk secara keseluruhan. Alokasi sumber pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat perlu disesuaikan. Mobilisasi dana masyarakat setempat juga bisa ditingkatkan. Selama tahun 1990, misalnya, dana yang berhasil dikumpulkan oleh bank di Timor Timur mencapai Rp 58,8 milyar, tetapi yang dapat disalurkan kembali ke masyarakat hanya 55% dari jumlah itu (*Bisnis Indonesia*, 10 Mei 1991). Peranan sektor swasta juga perlu ditingkatkan. Menurut perkiraan, pembiayaan Repelita V propinsi Timor Timur memerlukan dana investasi sebesar Rp 277,5 milyar. Dari jumlah ini diharapkan peranan swasta sebesar 20% sampai 25%. Selama periode 1984-1987, penanaman modal swasta hanya mencapai 8,7% dari keseluruhan investasi.

Peranan swasta tampaknya masih akan terbatas. Secara kumulatif hingga akhir tahun 1991 persetujuan PMDN hanya meliputi 6 proyek yang seluruhnya bernilai Rp 24,9 milyar. Dari proyek-proyek ini 4 proyek disetujui pada tahun 1990, sedangkan pada tahun 1991 sama sekali tidak terdapat per-

mohonan dan persetujuan PMDN di Timor Timur. Keempat proyek itu bernilai Rp 22,6 milyar dan direncanakan menampung 303 tenaga kerja Indonesia (dan 7 tenaga kerja asing). Ini berarti bahwa investasi per tenaga kerja (Indonesia) mencapai hampir Rp 75 juta (lihat laporan BKPM). Proyek Matahari Department Store dilaporkan bernilai Rp 4 milyar dan akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 100 orang, atau investasi sebesar Rp 40 juta per tenaga kerja. Sementara itu untuk proyek percontohan pertanian yang dibiayai pemerintah daerah investasi per tenaga kerja diperkirakan sebesar Rp 9 juta.

Jika secara rata-rata biaya investasi per tenaga kerja mencapai Rp 15 juta, maka untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak 6.000 diperlukan dana sebesar Rp 90 milyar atau sekitar sepertiga PDRB Timor Timur (tahun 1990).

Peranan swasta tentu perlu terus ditingkatkan. Peraturan PMA 100% yang baru saja diberlakukan pemerintah untuk 14 propinsi di Indonesia, termasuk untuk Timor Timur, diharapkan akan merangsang penanaman modal swasta di Timor Timur. Tetapi investasi swasta tidak akan memecahkan "krisis" pembangunan yang dihadapi ekonomi Timor Timur. Kuncinya, tetap masih terletak pada peranan dan pembiayaan oleh pemerintah. Untuk itu diperlukan pengkajian mengenai strategi dan mekanisme yang tepat bagi upaya pembangunan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.